

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) 2025



BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai bahan masukan penyusunan LKPJ Bupati Kepulauan Selayar yang akan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar.

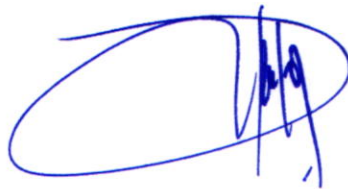
Penyusunan LKPJ ini mengacu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. LKPJ ini secara garis besar menggambarkan kinerja BKPSDM dengan sarana dan prasarana serta personil yang dimilikinya dan mencakup realisasi anggaran, realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi prioritas beserta permasalahan dan solusinya pada Tahun Anggaran 2025. BKPSDM telah menyelenggarakan urusan pemerintahan di Kepegawaian dengan tujuan memenuhi target kinerja yang tercantum pada Renja SKPD 2025 dan Renstra SKPD 2021-2026 BKPSDM dengan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*).

Penyusunan LKPJ ini secara sistematis sudah diupayakan disesuaikan kepada Surat Bupati Kepulauan Selayar Nomor 004/100.1.7/1/2026 tanggal 5 Januari 2026 perihal Penyusunan LKPJ Tahun Anggaran 2025. Dokumen LKPJ yang disusun ini berdasarkan hasil kinerja BKPSDM pada tahun 2025 pada masa kepemimpinan Kepala Badan periode tahun yang bersangkutan dengan mengacu pada Renstra BKPSDM tahun 2021-2026.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKPJ ini masih jauh dari sempurna, sehingga kami mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak demi penyempurnaan dan perbaikan LKPJ ini. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan LKPJ BKPSDM Akhir Tahun Anggaran 2025.

Benteng, 26 Januari 2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA,



ANDI TRIYANTI MUSDALIFAH, SE.,M.M

Pangkat : Pembina

NIP. 19780520 200604 2 036

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Foto Kantor BKPSDM	1
Gambar 1.2 Struktur Organisasi BKPSDM	7

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kualifikasi Pegawai menurut Pendidikan	9
Tabel 1.2 Kualifikasi Pegawai menurut Golongan	9
Tabel 1.3 Kualifikasi Pejabat Struktural	10

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I Pendahuluan	
1.1. Gambaran Umum BKPSDM	1
1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3. Sumber Daya BKPSDM	7
BAB II Gambaran Pelayanan BKPSDM	
2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	10
2.1.1 Capaian Kinerja berdasarkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan	10
2.1.2 Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama	25
2.1.3 Capaian Kinerja berdasarkan Urusan	26
2.1.4 Analisis kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja ...	28
2.1.5 Inovasi	29
2.1.6 Prestasi/Penghargaan	30
2.2. Kebijakan Strategis Tahun 2021	31
2.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	31
BAB III Penutup	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum BKPSDM

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disingkat BKPSDM adalah instansi pemerintah yang membantu tugas Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah.

Kedudukan BKPSDM diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar.

Gambar 1.1
FOTO KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan instansi pemerintah Tipe A yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, terletak di koordinat -6.1208390 Lintang Selatan dan 120.4666590 Bujur Timur, dengan alamat email bkppd@kepulauanseyarkab.go.id.

1.2 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi BKPSDM

Susunan organisasi serta tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan fungsi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. Pelaksanaan administrasi Badan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Tugas Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua

unsur di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan fungsi Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;
- b. Pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
- c. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

❖ **Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum**

Tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum adalah membantu Sekretaris melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, asset serta pengelolaan kepegawaian dan Perundang-undangan.

❖ **Kepala Subbagian Program**

Tugas Kepala Subbagian Program adalah membantu Sekretaris melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja.

❖ **Kepala Subbagian Keuangan**

Tugas Kepala Subbagian Keuangan adalah membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.

3. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian

Tugas Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian adalah membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian dan fungsi Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan

Tugas Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan adalah membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang mutasi, promosi, penilaian kinerja dan penghargaan dan fungsi Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang mutasi, promosi, penilaian kinerja dan penghargaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang mutasi, promosi, penilaian kinerja dan penghargaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang mutasi, promosi, penilaian kinerja dan penghargaan;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang mutasi, promosi, penilaian kinerja dan penghargaan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur

Tugas Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur adalah membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur dan fungsi Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan kompetensi aparatur;

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan kompetensi aparatur;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi aparatur;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang pengembangan kompetensi aparatur;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat Badan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Hukum;
 - 2. Sub Bagian Program;
 - 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam bentuk bagan, Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Gambar 1.2 :

Gambar 1.2
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA



BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 141 Tahun 2021 terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, terdiri atas :
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3 Sumber Daya BKPSDM

Jumlah pegawai di BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan data sampai dengan Bulan Desember 2025 sebanyak 44 orang, dengan klasifikasi menurut pendidikan dan pangkat/golongan serta jumlah pejabat struktural.

Tabel 1.1
KUALIFIKASI PEGAWAI MENURUT PENDIDIKAN

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1	S2	8	18,2
2	S1/DIV	25	56,8
3	D3	2	4,5
4	SLTA	9	20,5
TOTAL		44	100

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pegawai BKPSDM mayoritas berpendidikan S1/DIV yaitu sebanyak 25 orang atau 56,8%, selanjutnya yang berpendidikan SLTA sebanyak 9 orang atau 20,5%, selanjutnya yang berpendidikan S2 yaitu sebanyak 8 orang atau 18,2% dan berpendidikan D3 yaitu sebanyak 2 orang atau 4.8%. Hal ini menunjukkan bahwa kualifikasi pendidikan pegawai BKPSDM sudah memadai.

Tabel 1.2
KUALIFIKASI PEGAWAI MENURUT GOLONGAN

NO	GOLONGAN/RUANG	JUMLAH	%
1	Golongan IV/d	-	0
2	Golongan IV/c	-	0
3	Golongan IV/b	-	0
4	Golongan IV/a	6	13,6
5	Golongan III/d	10	22,7
6	Golongan III/c	4	9,1
7	Golongan III/b	5	11,4
8	Golongan III/a	9	20,4
9	Golongan II/d	1	2,3
10	Golongan II/c	4	9,1
11	Golongan II/b	-	0
12	Golongan II/a	-	0
13	Golongan IX	5	11,4
TOTAL		44	100

Tabel 1.3
KUALIFIKASI PEJABAT STRUKTURAL

NO	JABATAN	JUMLAH	%
1	KEPALA BADAN	1	12,5
2	SEKRETARIS	1	12,5
3	KEPALA BIDANG	3	37,5
4	KEPALA SUBBAGIAN	3	37,5
TOTAL		8	100

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1.1 CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TIDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KEPEGAWAIAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	IDPA BKPSDM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Alokasi Anggaran Rp.5.706.403.500,-	Realisasi Anggaran Rp.5.440.921.226,-			
			IDPA BKPSDM	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Alokasi Anggaran Rp.25.314.400,-	Realisasi Anggaran Rp.23.765.113,-			

					Alokasi Anggaran Rp.1.522.300,-	Realisasi Anggaran Rp.1.348.279,-			
	DPA BKPSDM	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			
				Alokasi Anggaran Rp.3.485.700,-	Realisasi Anggaran Rp.3.191.397,-				
	DPA BKPSDM	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi		3 Laporan	2 Laporan				
				Alokasi Anggaran Rp.3.108.200,-	Realisasi Anggaran Rp.2.883.401,-				
	DPA BKPSDM	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Alokasi Anggaran Rp.3.917.775.750,-	Realisasi Anggaran Rp.3.706.364.811,-				
	DPA BKPSDM	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		45 orang/bulan	45 orang/bulan				
				Alokasi Anggaran Rp.3.833.124.000,-	Realisasi Anggaran Rp.3.625.393.446,-				
	DPA BKPSDM	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	12 Dokumen				
				Alokasi Anggaran Rp.61.866.600,-	Realisasi Anggaran Rp.60.171.701,-				

					Alokasi Anggaran Rp.7.405.900,-	Realisasi Anggaran Rp.6.782.465,-			
	DPA BKPSDM		Mutasi dan Promosi ASN		Alokasi Anggaran Rp.305.623.500,-	Realisasi Anggaran Rp.297.745.669,-			
	DPA BKPSDM		Pengelolaan Mutasi ASN		5 Dokumen	5 Dokumen			
					Alokasi Anggaran Rp.29.396.400,-	Realisasi Anggaran Rp.28.632.930,-			
	DPA BKPSDM		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		700 Dokumen	700 Dokumen			
					Alokasi Anggaran Rp.45.336.700,-	Realisasi Anggaran Rp.43.494.987,-			
	DPA BKPSDM		Pengelolaan Promosi ASN		2 Dokumen	2 Dokumen			
					Alokasi Anggaran Rp.230.891.000,-	Realisasi Anggaran Rp.225.617.752,-			
	DPA BKPSDM		Pengembangan Kompetensi ASN		Alokasi Anggaran Rp.279.758.000,-	Realisasi Anggaran Rp.278.536.909,-			
	DPA BKPSDM		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		10 orang	10 orang			
					Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran			

					Rp.234.758.000,-	Rp.234.387.839,-		
	DPA BKPSDM	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan, Fungsional	2 Dokumen	2 Dokumen	Alokasi Anggaran Rp.45.000.000,-	Realisasi Anggaran Rp.44.149.070,-		
	DPA BKPSDM	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Alokasi Anggaran Rp.31.594.300,-	Realisasi Anggaran Rp.30.976.642,-				
	DPA BKPSDM	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	2 Dokumen	2 Dokumen				
			Alokasi Anggaran Rp.27.137.100,-	Realisasi Anggaran Rp.26.895.082,-				
	DPA BKPSDM	Pembinaan Disiplin ASN	38 orang	38 orang				
			Alokasi Anggaran Rp.4.457.200,-	Realisasi Anggaran Rp.4.081.560,-				
	DPA BKPSDM	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Alokasi Anggaran Rp.328.311.500,-	Realisasi Anggaran Rp.310.592.209,-				
	DPA BKPSDM	Pengembangan Kompetensi Teknis	Alokasi Anggaran Rp.188.338.400,-	Realisasi Anggaran Rp.176.904.566,-				

IDPA BKPSDM			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Kongkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	80 orang	80 orang				
				Alokasi Anggaran Rp.188.338.400,-	Realisasi Anggaran Rp.176.904.566,-				
IDPA BKPSDM			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Alokasi Anggaran Rp.139.973.100,-	Realisasi Anggaran Rp.133.687.643,-				
IDPA BKPSDM			Penyelenggaraan, Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan, Kepemimpinan dan Prajabatan	PKA 4 orang Orientasi PPPK 812 orang	PKA 4 orang Orientasi PPPK 812 orang				
				Alokasi Anggaran Rp.139.973.100,-	Realisasi Anggaran Rp.133.687.643,-				

2.1.2. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUSAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Urusan Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
1.	Nilai SAKIP OPD	-	Nilai	B	-		Belum direviu Itkab
2.	Laporan Keuangan OPD sesuai sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)		-	Sesuai	Sesuai		

2.1.2. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUSAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Urusan Kepegawaian						
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
1.	Nilai SAKIP OPD	-	Nilai	B	-		Belum direviu Itkab
2.	Laporan Keuangan OPD sesuai sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)		-	Sesuai	Sesuai		
1.	Jumlah yang telah mengikuti Pengembangan SDM melalui peningkatan Pendidikan Lanjutan	Program Kepegawaian Daerah - Kegiatan: Pengembangan Kompetensi ASN - Sub Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Lanjutan	%	25	16	64%	Dari 25 orang yang ditargetkan mengikuti Tugas Belajar terealisasi 16 orang diantaranya 6 mendapatkan bantuan Tugas dan meninggalkan tempat dan 13 orang mandiri dan

2.	Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Uji Kompetensi	<i>Program Kepegawaian Daerah</i> - Kegiatan: Pembangunan Kompetensi ASN - Sub Kegiatan : Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Fungsional	%	30	80	100%	
----	--	--	---	----	----	------	--

2.1.3 CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN URUSAN

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	Urusan Kepegawaian					
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					
1.	Persentase Pemenuhan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah	%	93,80%	97,39%	97,39%	Persentase pemenuhan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2025 target 93,80% dan terealisasi 97,39% Keterangan : Persentase pemenuhan ASN Tahun 2025 Yang terdiri dari 4.551 Formasi PPPK Paruh Waktu dan terealisasi sebanyak 4545 diantaranya 2848 Tenaga Teknis, 830 Tenaga Guru dan 867 Tenaga Kesehatan
2.	Persentase Pegawai Berkinerja Baik	%	100%	99,99%	99,99%	Persentase Pegawai Berkinerja Baik Tahun 2025 Target 100% terealisasi 99,99% Keterangan: Persentase Pegawai Berkinerja Baik Tahun 2025 tidak mencapai target dikarenakan Jumlah Pegawai yang mendapatkan

2.1.5 INOVASI

NO	URAIAN INOVASI	MAKSUD DAN TUJUAN INOVASI	HASIL/MANFAAT	KETERANGAN
1	2 Aplikasi Pensiun (SIMPOLE)	3 Terwujudnya digitalisasi dokumen pensiun dengan penerapan aplikasi layanan pensiun secara online sehingga proses pengurusan berkas pensiun menjadi cepat dan tepat Terwujudnya proses pengusulan pensiun yang tepat dan cepat bagi semua Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Terwujudnya pelayanan penertiban SK pensiun PNS yang optimal dengan penggunaan Sistem Teknologi Informasi Pensiun Online	4 Kemudahan akses dalam layanan pensiun dan percepatan penerbitan SK Pensiun serta Penerbitan SK Pensiun tepat waktu	5
2	Aplikasi E-Pangkat	Terwujudnya digitalisasi dokumen kenaikan pangkat dengan penerapan aplikasi layanan kenaikan pangkat secara online sehingga proses pengusulan berkas menjadi cepat dan tepat Terwujudnya proses pengusulan kenaikan pangkat yang tepat dan cepat bagi semua Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Terwujudnya pelayanan an penerbitan SK kenaikan pangkat yang optimal dengan penggunaan Sistem Teknologi Informasi Kenaikan Pangkat Online	Kemudahan akses dalam layanan kenaikan pangkat dan percepatan penerbitan SK kenaikan pangkat serta penerbitan SK kenaikan pangkat tepat waktu	
3	Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Produk Kepegawaian Berbasis Elektronik (SISUKSES)	Terwujudnya transparansi proses dan status layanan kepegawaian	Mempermudah memperoleh informasi berkaitan dengan dokumen kepegawaian sehingga evaluasi dan monitoring pelaksanaan penyelesaian	

			dokumen pegawai dapat real time dan akurat
			Mengurangi Human Error dalam pelaksanaan pemantauan proses penyelesaian dokumen kepegawaian

2.1.6 PRESTASI/PENGHARGAAN

NO	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT				DISELENGGARAKAN OLEH/PENYELENGGARA	KETERANGAN
		INTERNASIONAL	NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN		
1	Verifikasi dan Validasi Kenaikan Pangkat PNS dengan Aplikasi DOCU DIGITAL	3	4	5	6	7	8
2	BKN AWARD 2022		Batam 21 Juli 2022			Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan Bekerjasama dengan Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makassar	Kegiatan Verifikasi dan Validasi Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS periode Oktober 2022
3	BKN AWARD 2022		Batam 21 Juli 2022			Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia	Peringkat 4 Atas capaian dalam Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja
						Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia	Peringkat 1 Atas capaian dalam Penerapan Pemanfaatan Data-Sistem Informasi dan CAT

4	SISTEM MERIT	Jakarta, 18 Juli 2022	Komisi Aparatur Sipil Negara	Atas Keberhasilannya Menerapkan SISTEM MERIT dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dengan Perdiklat Baik
---	--------------	-----------------------	------------------------------	--

2.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN TAHUN 2025

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM			TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	KETERANGAN
		NOMOR/TANGGAL PENGESAHAN	TENTANG			
1	SURAT EDARAN	1242/800.1.1.4/VII/2025 30 JULI 2025	4	KEWAJIBAN MEMILIKI SERTIFIKAT PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH SEBAGAI SYARAT PENGISIAN DAN PELAKSANAAN JABATAN [PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN PEJABAT PENGADAAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	5	6
2	SURAT EDARAN	1655/800.1.6.2/IX/2025 26 SEPTEMBER 2025		PENILAIAN SKP BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS	SEBAGAI PEDOMAN/DALAM MEWUJUDKAN KINERJA DAN PENCAPAIAN TARGET STRATEGIS PEMERINTAH	

				KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
3	SURAT BUPATI KEPULAUAN SELAYAR	575/800.1.3/XI/2025 3 NOVEMBER 2025	PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN PEJABAT ADMINISTRATOR	SEBAGAI PEDOMAN PENATAAN ORGANISASI DAN PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

2.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI TAHUN ANGGARAN 2025

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4
1	Agar melakukan penataan ASN terutama Tenaga Kesehatan, dan Guru serta Kepala Sekolah yang belum memenuhi syarat, sehingga sebarannya menjadi proporsional di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar	BKPSDM secara berkelanjutan melaksanakan penataan ASN dengan mengedepankan prinsip merit, profesionalisme dengan pemerataan layanan public Penataan ini juga dilaksanakan secara berkelanjutan melalui pemetaan formasi dan program pengembangan kompetensi ASN. Pemetaan formasi untuk pemenuhan kebutuhan tenaga Kesehatan dan tenaga pendidik selalu menjadi prioritas yang dilakukan melalui jalur rekrutmen baik melalui CPNS maupun PPPK.	BKPSDM telah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Dinas Kesehatan dalam hal pemetaan kebutuhan dan persebaran ASN berbasis wilayah dengan tujuan pemerataan layanan di seluruh kecamatan dan desa/kelurahan Kabupaten Selayar. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN yang mewajibkan penempatan ASN secara proporsional dan berbasis kebutuhan riil (analisis jabatan dan analisis beban kerja).

2	<p>Agar pengusulan penerimaan calon ASN dan PPPK disesuaikan dengan kebutuhan, dan di koordinasikan dengan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar.</p>	<p>Terkait pengusulan formasi ASN (PNS dan PPPK) BKPSDM memastikan bahwa dalam melakukan pengajuan formasi berdasarkan pada analisis jabatan dan analisis kebutuhan pegawai serta kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal koordinasi dengan DPRD, secara normatif dan etika kewenangan kelembagaan, maka DPRD pada hakekatnya tidak terlibat secara langsung pada proses manajemen kepegawaian dalam hal perencanaan kebutuhan (Pengusulan Formasi)</p>	<p>BKPSDM sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan pengelolaan manajemen kepegawaian akan membangun koordinasi dalam rangka membangun sinergitas antara eksekutif dan legislative, utamanya dalam hal fungsi pengawasan DPRD yang terkait dengan kebijakan-kebijakan internal tentang manajemen kepegawaian. BKPSDM juga secara terbuka melakukan penyampaian informasi kepada DPRD dalam rangka transparansi dan keterbukaan informasi public, tanpa mengurangi kewenangan teknis pengelolaan kepegawaian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p>
3	<p>Agar dalam hal melakukan pengeseran ASN dan pengangkatan pejabat pada lingkup sekretariat DPRD agar di koordinasikan dengan ketua DPRD demi menjaga stabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan terhadap Lembaga DPRD.</p>	<p>Terkait koordinasi pengeseran ASN dan pengangkatan Pejabat dengan pimpinan DPRD hanya diwajibkan dalam pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, yaitu Sekretariat DPRD. Untuk jabatan administrator dan pengawas, tidak terdapat ketentuan hukum yang mengatur koordinasi tersebut.</p>	<p>BKPSDM di setiap penataan jabatan lingkungan Sekretariat DPRD telah di lakukan secara profesional oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) berdasarkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan prinsip meritokrasi. BKPSDM juga menegaskan komitmen memegang teguh kode etik ASN. Dalam penempatan pejabat pada lingkup instansi pemerintah daerah, juga telah dilakukan atas pertimbangan teknis kepala BKN yang telah memenuhi standar NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)</p>

BAB III

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Badan dalam rangka mewujudkan transparansi dan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2025 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2025 ini merupakan laporan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan selama kurun waktu 1 (satu) tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Selayar. Beberapa program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berhasil dilaksanakan merupakan hasil dari adanya sinergitas dan harmonisasi hubungan serta dukungan dari masyarakat dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar.

Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai, analisa dan evaluasi digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pemerintahan dan pelayanan publik untuk mendukung tercapainya *good governance* pada masa mendatang. Kami memiliki harapan besar LKPJ ini dapat menjadi media informasi kepada masyarakat, serta dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien mulai dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Demikian LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2025 semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Benteng, 26 Januari 2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA,



ANDI TRIYANTI MUSDALIFAH., SE.,M.M

Pangkat : Pembina

NIP. 19780520 200604 2 036